

**KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT  
PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN SETELAH TERJADI PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**Rika Claudya Yunita  
Nim. 135010107111046**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN****KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT  
PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN SETELAH TERJADI PERCERAIAN**

Rika Claudya Yunita

135010107111046

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal.....  
dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Dr. Siti Hamidah S.H., M.M

NIP. 19660622 199002 2 001

Pembimbing Pendamping

Fitri Hidayat S.H., M.H.

NIP. 201208 850707 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian,  
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at. S.H., M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, S.H., LLM.

NIP. 19720622 200501 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

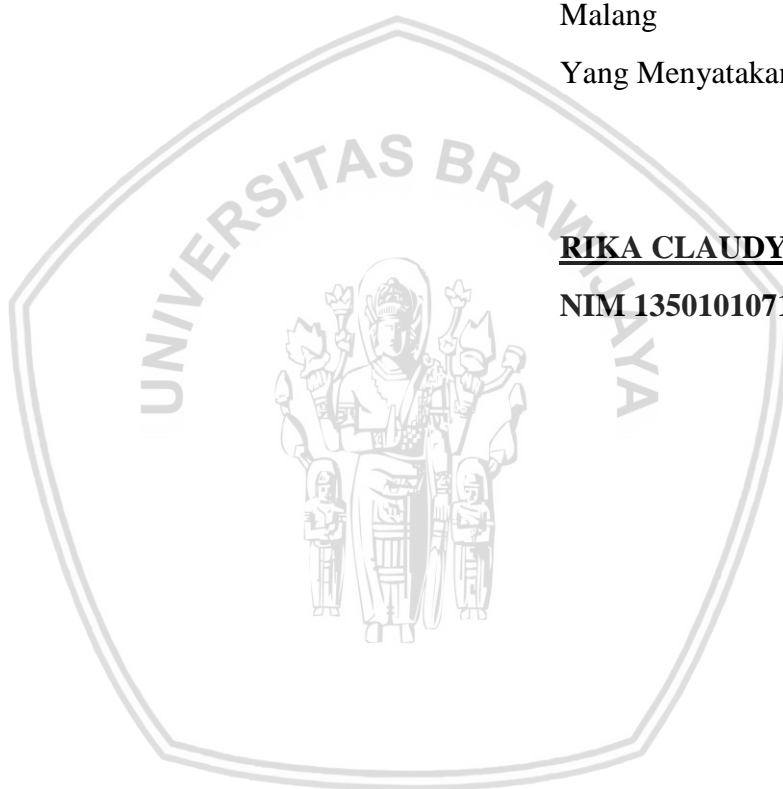
Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut ats gelar kesarjanaan saya.

Malang

Yang Menyatakan

**RIKA CLAUDYA YUNITA**

**NIM 135010107111046**



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at. S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Siti Hamidah S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
4. Ibu Fitri Hidayat S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Orang Tua (Ibu dan Ayah), Adek Arya Wira Yudha dan keluarga yang selalu mendoakan, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sacrizal Nicqi Supriyono yang selalu menemani dan tidak pernah lelah memberikan semangat dan doanya selama menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman kostan Semanggi Timur No.12 Tamara, Diva, Rana, Mbak Dea, Rila selaku anak rempong dan teman yang berbagi keluh kesah yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jikaq dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar

## RINGKASAN

Rika Claudya Yunita, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SETELAH TERJADI PERCERAIAN

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kepastian hukum pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut ialah menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya. Dengan demikian seseorang yang berwarganegara Indonesia(WNI), bersuku jawa, dan beragama islam melakukan pembagian harta bersama setelah perceraian maka terdapat 3 (tiga) hukum yang mengatur perbuatan hukum tersebut yaitu hukum nasional, hukum islam dan hukum adat jawa, hal ini bentuk kekaburan hukum (*Vague of Norm*) dalam penggunaan hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Hukum Agama, Hukum Adat, Dan Hukum lain-lainnya memiliki pengaturan yang berbeda. Sehingga isi Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan kepastian hukum terkait pengertian pengaturan pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah (1) bagaimana pembagian harta bersama Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal terjadi perceraian yang berkepastian hukum?. Penelitian yang penulis teliti ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penyelesaian pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. bagi orang yang beragama Islam, pembagian harta bersama akan di selesaikan berdasarkan hukum islam. Begitu pula bagi masyarakat yang masih perpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka. Hakim mempunyai peran untuk menafsirkan menggunakan hukum yang mana saja yang dapat diutamakan dalam penerapan pembagian harta bersama setelah peceraian. Sehingga untuk menjamin kepastian pada saat ini terkait pembagian harta bersama menurut hukum masing-masing mengacu kepada keputusan hakim.

## SUMMARY

Rika Claudya Yunita, *Study Program Of Civil Law, Faculty Of Law, Brawijaya University, May 2018, LEGAL CERTAINLY OF SHARING COMMON PROPERTY ACCORDING TO CONSTITUTION OF 1974 IN ARTICLE 37 NO.1 ABOUT MARRIAGE AFTER THE DIVORCE*

*In this research, the researcher raised the problem on legal certainty of sharing common property after divorce under constitution of 1974 in article 37 no. 1, which states that "when marriage breaks up due to a divorce, common property be regulated according to the law of each, based on the constitution of 1974 in article 37 No. 1 that is according to the law religion, of tradition, and law of another". Therefore, someone whom citizen of Indonesia (WNI), Javanese ethnic, religion of Islam, do their sharing common property after the divorce, then there are 3 (three) law governing deeds of that law which are law of national, law of Islam, and law tradition of java. This is a form of legal vagueness in the use of which law to use in problem solving of sharing common property after the divorce because the arrangement of marriage property and sharing common property after divorce according to law religion, law of tradition, and law of another which have different of arrangement. So the contents of article 37 about marriage is not giving the certainty of law related to understanding about regulation of sharing common property according to law of each. Related to the background stated above, this research raised the problem of the study (1) how to deal with sharing common property according to constitution of 1974 in article 37 No 1 about marriage after the divorce using legal certainty? This study is conducted by using juridical normative with method of statute approach.*

*The result of the study using method stated above, researcher gaining the answer to existing problem that the completion of the sharing of common property can be done with three legal alternatives, such as law of religion, law of tradition, or law of another. For moslem, sharing of common property can be completed by law of Islam. Reciprocally for society who still hold firmly to their tradition, as long as they are part of moslem, so that in case of a dispute sharing of common property will be done based on the law Islam. Whereas for society of tradition which is not moslem, so that it will be done based on the law of their tradition as long as that case is not regulated in their religion. Judges have a role to interpret using which priority of legal in the implementation of sharing common property after the divorce. Judge have a role to interpret using which priority of legal in the implementation of sharing common property after the divorce. Nowadays, to ensure the certainty related to sharing of common property according to each legal is referring to the judge's decision.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN .....	iv
SUMMARY .....	v
DAFTAR ISI.....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	12

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perkawinan .....	14
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	14
2. Asas-Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	16
B. Kajian Umum Tentang Harta Dalam Perkawinan.....	20
C. Kajian Umum Tentang Harta Bersama .....	25
1. Harta Bersama.....	25
a. Harta Bersama Berdasar Peraturan Perundang-undangan.....	26
b. Harta Bersama Berdasar Hukum Islam.....	28
c. Harta Bersama Berdasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	31
d. Pembagian Harta Bersama Menurut Adat .....	34
D. Kajian Umum Tentang Kepastian Hukum .....	39

### BAB III Metode Penulisan

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Metode Pendekatan Penelitian .....	43
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	44

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum .....	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	45
F. Definisi Konseptual .....	47

#### **BAB IV Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut**

##### **Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang**

##### **Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian**

A. Putusan Hakim Untuk Menentukan Harta Bersama.....	49
B. Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Berdasar Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).....	55
C. Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Berdasar Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI).....	62
D. Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Berdasarkan Hukum Adat .....	72

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86

<b>Daftar Pustaka</b> .....	87
-----------------------------	----

#### **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Rumah tangga yang bahagia dan kekal merupakan impian dari setiap orang yang melangsungkan pernikahan, dimana sebuah pernikahan tersebut dapat menimbulkan keadaan atau perasaan yang tentram dan senang.

Salah satu akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah adalah terjadinya persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut apabila tidak dikehendaki terjadinya pemisahan harta oleh suami istri tersebut. Hal ini berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Pada suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.<sup>2</sup> Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri setelah terjadinya suatu ikatan perkawinan. Harta bersama ini berbeda dengan harta bawaan karena harta bawaan merupakan harta yang dibawa atau diperoleh oleh suami istri sebelum perkawinan. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat (adat jawa) yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> J. Satrio, **Hukum Harta Perkawinan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 38.

berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini di dukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pada kehidupan yang terjadi pada masyarakat tidak semua perkawinan yang terjadi selalu berlangsung dengan bahagia dan tentram, bahkan tidak sedikit perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian adalah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Sedangkan, perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama disebut cerai talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian dari pihak istri oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama disebut cerai gugat.<sup>3</sup> Perkawinan yang putus karena perceraian mengakibatkan adanya pembagian harta bersama yang telah diperoleh antara suami istri.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan istri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami dan istri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja untuk mendapatkan nafkah atau

---

<sup>3</sup> Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

harta, sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.<sup>4</sup>

Di negara hukum seperti Negara Indonesia, pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur dalam berbagai produk hukum, seperti diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan hukum adat setempat bagi masyarakat adat yang masih menganut hukum adatnya. Pada dasarnya dari beberapa produk hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan produk hukum hasil unifikasi dari pluralisme hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Mengingat bahwa negara Indonesia negara yang kaya akan hukum adat setempat. Menurut Van Vollenhoven membagi negara Indonesia atas 19 (Sembilan belas) hukum adat, yang berdasarkan atas perbedaan-perbedaan dalam tata susunan rakyat dengan persekutuan-persekutuan rakyat.<sup>5</sup> Selain hukum adat tersebut, hukum belanda (*Burgerlijk Wetboek*), dan hukum islam juga berkembang dan berlaku di Indonesia. Adanya unifikasi hukum perkawinan bukan berarti menghapus seluruh keberadaan hukum-hukum perkawinan lainnya yang pernah ada di Indonesia.

Pada dewasa ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi hukum nasional yang mengatur tentang Perkawinan dan berfungsi sebagai

<sup>4</sup> H.M Rasjidi, **Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Mandar Maju, Alumni Bandung, hlm. 4.

<sup>5</sup> H.M Anshary, **Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya**, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 27.

“payung hukum” dan “sumber hukum pokok” bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini dinyatakan secara tegas dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya hukum perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.” Rumusan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencerminkan pelaksanaan teknik kompilasi hukum sebagai modifikasi pelaksanaan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Adapun yang dimaksud “hukumnya masing-masing” dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut ialah menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.<sup>7</sup> Dengan demikian seseorang yang berwargakenegaraan Indonesia (WNI), bersuku Jawa, dan beragama Islam melakukan pembagian harta bersama setelah perceraian, maka terdapat 3 (tiga) hukum yang dapat mengaturnya perbuatan hukum tersebut yaitu Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat Jawa, hal

---

<sup>6</sup> Rosnidar Sembiring, **Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 46.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 90-91

seperti ini merupakan bentuk kekaburan hukum (*Vague of Norm*) dalam penggunaan hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya memiliki pengaturan yang berbeda. Sehingga isi dari pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan kepastian hukum terkait pengertian pengaturan pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-masing.

Salah satu kasus adalah mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian terjadi di Desa Sungai Selodang, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Penduduk di desa ini sangat menjunjung norma-norma agama dan adat. Di desa ini, apabila ada terjadi kasus cerai perkawinan yang dilakukan oleh seorang istri (gugatan cerai), maka wanita tersebut tidak menerima harta bersama dari pihak suaminya, akibat gugatan cerai yang dilakukannya. Namun, apabila cerai itu dilakukan oleh pihak suami (thalaq), suami tersebut akan mendapat pembagian harta bersama dari perkawinan yang telah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Rusnah yang menggugat cerai terhadap suaminya Basri, dimana hakim Pengadilan Agama Kabupaten Siak mengabulkan gugatan cerai Rusnah tersebut.<sup>8</sup> Akibatnya, berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, Rusnah harus keluar dari rumah suaminya dengan tanpa membawa apa-apa dari harta yang telah diperolehnya selama perkawinan

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkalis, No : 05/Ptd.G/PA.BKS, tanggal 15 Januari 2004

yang telah dilaluinya. Kasus serupa juga dialami juga oleh Salmiati, yang menggugat cerai terhadap suaminya Muhammad Jais, dan gugatan cerai tersebut dikabulkan juga oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Siak.<sup>9</sup> Sehingga Rusnah dan Salmiati tidak mendapat bagian dari harta bersama yang diperoleh bersama dengan mantan suaminya selama perkawinan. Menurut tokoh adat di desa tersebut, diantara alasannya adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Bahwa ketentuan seperti sudah lama menjadi warisan dari pendahulu mereka serta menjadi rujukan bagi pelaku adat,
2. Ditetapkan seperti ini tentunya membuat jera sekaligus peringatan bagi istri-istri yang lain bahwa menggugat cerai oleh seorang istri adalah perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum adat.

Berdasar contoh kasus diatas, bahwa Rusnah dan Salmiati telah melakukan perceraian secara Hukum Islam dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat, namun menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama tidak menggunakan hukum islam melainkan menggunakan hukum adat setempat karena di Desa Sungai Selodang, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Propinsi Riau tersebut masih kental dengan hukum adat dan hukum kebiasaan setempat.

Menurut Subekti bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkalis, No : 126/Ptd.G/PA.BKS, tanggal 17 September 2009

<sup>10</sup> Azzumar, **Pembagian Harta Bersama Akibat Cerai Gugat dalam Hukum Adat Menurut Perspektif Hukum Islam**, Pekanbaru, 2011, hlm. 5



rakyatnya.<sup>11</sup> Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan “ dan “ketertiban”. Keadilan ini digambarkan sebagai sesuatu yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan guncangan dan kegelisahan, dengan demikian hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Sedangkan menurut Mr. J Van Kan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Disini jelaslah bahwa hukum berguna untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat. Sehingga dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk masyarakat. Oleh karena hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum maka seharusnya pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kepastian hukum terkait hukum mana saja yang dapat diutamakan dalam penerapan pembagian harta bersama setelah perceraian.

Adanya Hukum-hukum lainnya diatur dalam isi pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) terkait pembagian harta bersama setelah perceraian tidak memberikan kepastian hukum dari sebuah produk perundang-undangan yang merupakan bentuk

---

<sup>11</sup> Subekti, **Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan**, Intermasa, Jakarta, 1975, hlm. 57.

unifikasi dari pluralisme hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Terdapat penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dapat di lihat pada tabel berikut:

**tabel 1.1**

**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Penelitian Intransi dan judul penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan	Persamaan dan Perbedaan
1	Sary Hariyanti (Universitas Brawijaya Malang)  Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 2198/PDT.G /2012/PA.MLG	1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 2198/PDT.G/2 012/PA.Mlg tentang harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami?  2. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2 012/PA.Mlg?	Skripsi ini membahas tentang melindungi harta istri agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga hartanya jelas dan tidak kabur. Meningat tujuan lahirnya undang- undang nomor 1 tahun 1974 yaitu salah satunya untuk melindungi kaum perempuan.	Persamaan dengan skripsi yang saya kaji dan analisa Yaitu Tentang Harta Bersama  Perbedaan dengan skripsi yang saya kaji dan analisis penulis mengkaji penyelesaian pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

2	<p>Riana Wulandari Asanto (Universitas Muhammadiyah Surakarta )</p> <p>Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)</p>	<p>1. bagaimana pembagian harta bersama yang diakibatkan perceraian?</p> <p>2. Bagaimanakah akibat hukumnya setelah dilakukan pembagian harta bersama tersebut?</p>	<p>Skripsi ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai.</p>	<p>Persamaan dengan skripsi yang saya kaji dan analisa Yaitu Tentang Harta Bersama</p> <p>Perbedaan dengan skripsi yang saya kaji dan analisis penulis mengkaji penyelesaian pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.</p>
3	<p>Rabiatul Adawiyah. K (Universitas Hasanuddin Makassar)</p> <p>Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.g/2011/PA Makassar)</p>	<p>1. Bagaimanakah kedudukan hukum dari harta bersama dan harta bawaan?</p> <p>2. Bagaimanakah tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar?</p>	<p>Skripsi ini mengkaji kedudukan hukum dari harta bersama dan harta bawaan. Serta menganalisis Putusan PA Makassar</p>	<p>Persamaan dengan skripsi yang saya kaji dan analisa Yaitu Tentang Harta Bersama</p> <p>Perbedaan dengan skripsi yang saya kaji dan analisis penulis mengkaji penyelesaian pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.</p>

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait **KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SETELAH TERJADI PERCERAIAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dari permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

Bagaimana pembagian harta bersama Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal terjadi perceraian yang berkepastian hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum terhadap pembagian harta perkawinan menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan setelah terjadinya perceraian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam bidang keilmuan khususnya pada hukum Perkawinan serta memaparkan Tentang kepastian hukum terhadap pembagian harta perkawinan menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Secara Praktis

Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi serta menambah ilmu pengetahuan yang mendalam tentang pembagian harta bersama menurut hukum positif di Indonesia, khususnya pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, agar kedepannya peneliti sudah memiliki wawasan yang lebih luas apabila peneliti mengambil pekerjaan dalam Ilmu Hukum Keperdataan.

Bagi Hakim

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai tentang pembagian harta bersama menurut hukum positif di Indonesia, khususnya pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis (keadilan).

Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai tentang pembagian harta bersama menurut hukum positif di Indonesia, khususnya pada

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi permasalahan pembagian harta bersama yang terjadi disekitar.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sebelum dilanjutkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai masalah yang akan diteliti, maka perlu diuraikan terlebih dahulu isi penelitian secara ringkas agar garis besar isi yang terkandung di dalamnya terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan ditulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berupa pernyataan singkat mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yang menguraikan dan menjelaskan kegunaan dari penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai teori-teori atau pendapat-pendapat dari para ahli serta hasil atau informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang di lakukan, selanjutnya dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah.

### **BAB III : METODE PENULISAN**

Bab ini menguraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian, jenis dan sumber bahan



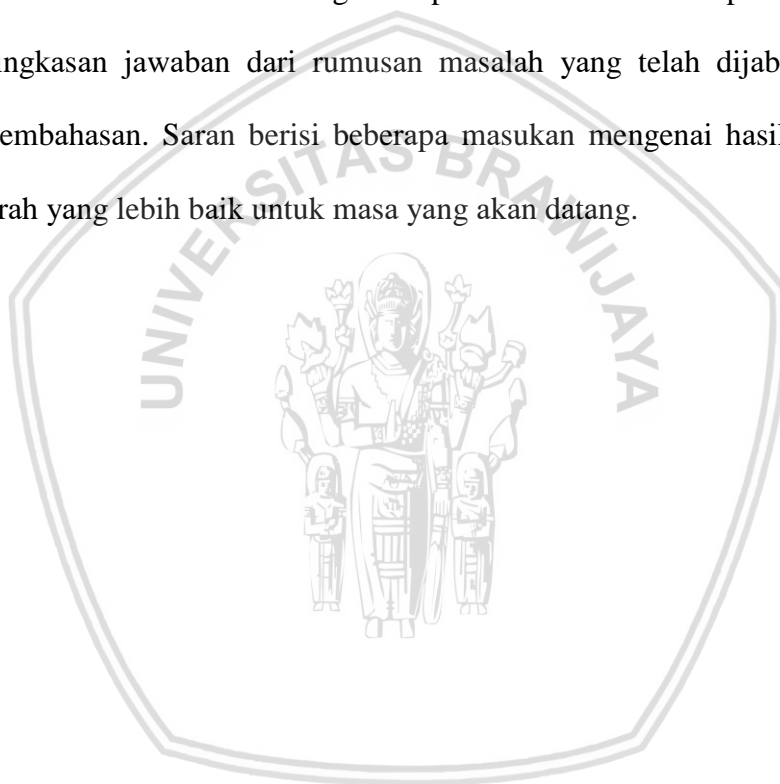
hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi beberapa masukan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

###### Tentang Perkawinan

Menurut Subekti, “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”<sup>1</sup> Sah tidaknya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan diukur dari ketentuan hukum agama dan juga dari kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan cara memenuhi semua syarat dan juga rukun hukum dari agamanya dan kepercayaannya tersebut. Sehingga menurut pendapat ini, pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif bukan untuk menentukan sah tidaknya perkawinan.<sup>2</sup>

Menurut R Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Sedangkan, menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.

---

<sup>1</sup> Subekti, **Pokok-Pokok dari Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1975, hlm. 20.

<sup>2</sup> H. Riduan Syahrani, S.H., **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Mandar Maju, Alumni Bandung, 2010, hlm. 82.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang disusun dalam pasal 1 UU Perkawinan merupakan akibat dari pandangan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama, terutama agama Islam. Perkawinan dipahami tidak hanya sebagai hubungan fisik (jasmani), tetapi merupakan “ikatan” jasmani dan rohani. Perkawinan dalam UU Perkawinan adalah hubungan suci dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan ajaran agama. Tujuan perkawinan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dalam pasal 1, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bisa dikatakan bahwa memang tujuan perkawinan adalah meneruskan garis keturunan. Namun Pembentukan keluarga dimaksud harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, memperlihatkan bahwa perkawinan merupakan media untuk mencapai kebahagiaan dan kekal.

Pada pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu”. dikatakan bahwa rukun dan syarat-syarat perkawinan telah ditentukan oleh tiap-tiap ajaran agama dan para pemeluknya diwajibkan untuk mengikuti rukun serta syarat-syarat perkawinan tersebut. Latar belakang sosial pasal 2 UU Perkawinan adalah keragaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dari segi bentuknya, UU Perkawinan merupakan kodifikasi, bukan unifikasi. Oleh karena itu, ia memberikan ruang bagi berlakunya hukum perkawinan agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor sosial yang mempengaruhi pasal tersebut bukan faktor agama, melainkan kebijakan politik yang ditetapkan oleh pemerintah ketika itu.

## 2. Asas-Asas Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal;
- 2) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 6.

- 3) Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan;
- 4) Perkawinan berasas monogami terbuka;
- 5) Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan;
- 6) Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun;
- 7) Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan;
- 8) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas perkawinan yang monogami. Kaidah pasal 3 ayat (1) tersebut agak mirip dengan bunyi pasal 27 KUHPdata yang mengatakan bahwa, "Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya".

Perbedaannya terletak pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dengan

adanya pasal ini maka berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

Oleh karena sebagaimana pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan di dalam penjelasannya bahwa, Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.<sup>4</sup>

Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 ini jelas-jelas diperuntukan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi keluarga tentram dan bahagia, juga bertujuan untuk mengubah tatanan aturan yang telah ada dengan aturan baru yang menjamin cita-cita luhur dari perkawinan melalui 6 (enam) asas/ prinsip yang dominan berikut:

- 1) Asas sukarela. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Asas partisipasi keluarga dan dicatat. Perkawinan merupakan peristiwa penting, maka partisipasi orang tua diperlukan

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 33-34.



terutama dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Asas monogami. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Dengan kata lain, UU Nomor 1 Tahun 1974 mengandung asas mempersulit poligami. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
- 4) Asas perceraian dipersulit. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepannya. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Walaupun pintu perceraian ini bagi orang islam dibuka itu hanya kecil saja, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada masyarakat.
- 5) Asas kematangan calon mempelai. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan

perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian.

- 6) Asas memperbaiki derajat kaum wanita. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

## **B. Kajian Umum Tentang Harta Dalam Perkawinan**

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya, dengan jumlah anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>5</sup>

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”. berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa

---

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana, **Hukum Ekonomi Sosial Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 111.

kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan perannya yang sangat penting dalam kehidupan keluarga bahwa sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Oleh karena itu dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa:

*Ayat (1) menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.*

*Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.*

Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Akan tetapi apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh pasangan suami istri selama perkawinan dapat diatur menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum

adat atau hukum lain di luar hukum adat. Pasal-pasal tersebut di atas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum menikah.
- 2) Dengan ikatan perkawinan, istri maupun suami secara interinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

Pada suatu perkawinan suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara, baik terhadap harta asal maupun harta bersama. Hal ini berarti bahwa masing-masing suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan harta benda perkawinan ini adalah harta asal dan harta bersama senantiasa mempunyai kedudukan yang terpisah satu sama lain, kecuali terhadap aturan-aturan tersebut ada ketentuan lain yang menyimpang yang didasarkan pada kesepakatan para pihak suami dan istri.<sup>7</sup> Soerjono Soekanto membagi harta benda yang ada dalam perkawinan ke dalam 4 kategori, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Happy Susanto, **Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian**, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 10.

<sup>7</sup> Sonny Dewi Judiasih, **Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)**, PT Refika Aditama, Bandung, 2015), hlm. 6.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 9.

- a. Harta kekayaan yang diperoleh dari seorang suami maupun istri yang merupakan suatu warisan ataupun hibah yang diberikan oleh kawan yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta kekayaan diperoleh dari usaha suami dan istri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
- c. Harta kekayaan diperoleh dari hadiah kepada suami dan istri pada waktu perkawinan.
- d. Harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri pada masa perkawinan.

Menurut J.Satrio,"hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan."<sup>9</sup>

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Kedudukan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan digolongkan dalam beberapa macam, yaitu :<sup>10</sup>

- a. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;

---

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana. Op.Cit. hlm. 27.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 10.

- b. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan disebut harta penghasilan;
- c. Harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan ialah harta pencaharian;
- d. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah disebut sebagai hadiah perkawinan.

Harta pencaharian sering disebut juga sebagai harta bersama, karena pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami-istri tersebut dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Sedangkan harta bawaan merupakan harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperoleh karena mendapat warisan, hadiah, atau usaha-usaha lain selama para pihak tidak menentukan lain. Harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan harta bawaan dan harta perolehan diatur dalam 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pula.

Pengaturan hukum atas harta bersama jika terjadi perceraian adalah menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam praktik, penggunaan hukum agama atau hukum adat tergantung pada agama dan suku dari suami istri. Jika suami dan istri yang putus karena perceraian menganut agama Islam, mereka selalu membagi harta benda berdasarkan hukum Islam, namun tidak pula menutup kemungkinan dibagi berdasarkan hukum adatnya. Bagi agama non Islam,



pembagian harta benda karena perceraian selalu tunduk pada hukum adat jika mereka satu suku, dan kalau tidak ada kesepakatan diselesaikan menurut hukum adat maka yang berlaku adalah hukum positif.<sup>11</sup>

## C. Kajian Umum Tentang Harta Bersama

### 1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.<sup>12</sup> Harta bersama meliputi:

- 1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
- 2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian.
- 3) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa, harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan,

---

<sup>11</sup> Rosnidar Sembiring. Op.Cit. hlm. 90.

<sup>12</sup> Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, **Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96.

sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.<sup>13</sup>

#### **a. Harta Bersama Berdasar Peraturan Perundang-Undangan**

Harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan merupakan harta bersama. Ketentuan pasal ini memarginalkan keberlakuan hukum adat terutama bagi masyarakat yang menganut sistem adat patrilineal (kebapakan) seperti adat masyarakat batak, yang apabila terjadi perceraian, sang istri tidak mendapat harta perkawinan sama sekali, dan semua harta kembali kepada suami. Juga memarginalkan keberlakuan hukum adat yang menafikan hak istri terhadap harta perkawinan.

Pasal 35 ayat (2) menegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas harta terpisah. Artinya semua harta bawaan suami dan istri maupun harta yang diperoleh secara cuma-cuma oleh suami dan istri seperti perolehan harta warisan, wasiat, atau hibah dan pemberian lain yang meskipun hal itu diterima setelah dalam perkawinan, maka kesemuanya itu termasuk harta bawaan yang keberadaannya dibawah kekuasaan masing-masing suami istri. Kecuali suami istri menentukan lain dengan membuat

---

<sup>13</sup> J Satrio. Op.Cit. hlm 66.

perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung yang menyatakan bahwa semua harta bawaan dilebur menjadi satu yang merupakan harta persatuan bulat. Untuk yang terakhir ini keduanya menjadi harta bersama.

Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak." Ketentuan yang sama diatur pula dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, "masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum."

Pasal ini memunculkan suatu paradigma baru dalam bidang hukum yaitu menyetarakan kedudukan suami istri dalam lalu lintas hukum. Pasal ini menghendaki adanya kesamaan hak bagi suami istri untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang istri dapat saja menjual harta bersama atas persetujuan suaminya, demikian pula seorang suami ketika menjual harta bersama harus mendapat persetujuan dari istrinya. Seorang suami yang menjual sebagian harta bersama tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan istrinya, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, demikian pula sebaliknya.

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengatur, bahwa bila terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. "Pasal 37 ini

memberi peluang kepada orang yang melakukan perceraian untuk menyelesaikan harta bersamanya melalui hukum yang ia yakini. Apabila ia beragama Islam maka hukum Islamlah yang dipakai untuk menyelesaikannya. Begitupun orang yang tunduk kepada hukum adat, maka hukum adatlah yang mengatur pembagian harta bersamanya berkaitan dengan terjadinya perceraian.

#### **b. Harta Bersama Berdasar Hukum Islam**

Dalam kitab-kitab fiqh, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur syirkah (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.<sup>14</sup>

Sebagaimana bahwa kepemilikan harta suami dan istri dalam masa perkawinan mereka tidak lepas dari 3 (tiga) kategori berikut.<sup>15</sup>

- 1) Harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan istri pada harta itu. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja suami sebelum perkawinan dengan istrinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta

---

<sup>14</sup>Abdul Manan, **Anekan Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 109.

<sup>15</sup> Happy Susanto, op.cit. hlm. 50.

yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya yang lazim disebut harta bawaan.

- 2) Harta milik istri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh istri saja tanpa kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja istri sebelum menikah, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk istri, atau harta yang diwariskan kepada istri, dan lain-lain.
- 3) Harta milik bersama suami dan istri. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami istri, atau harta benda yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, dan sebagainya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, harta bersama yaitu harta milik bersama suami istri yang diperoleh sepanjang masa perkawinan mereka. Dalam istilah fiqih, harta milik bersama ini disebut *syirkah amlak*, yaitu kepemilikan bersama atas suatu benda (*syarikah al-'ain*), seperti kepemilikan bersama atas harta yang diwarisi oleh dua orang, atau harta yang dibeli oleh dua orang, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada dua orang.<sup>16</sup>

Salah satu masalah hukum yang sering dihadapi oleh para istri yang sedang menempuh proses perceraian atau setelah bercerai dengan suaminya adalah masalah harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung. Para istri sering menjadi

---

<sup>16</sup> Taqiyuddin **An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam**, hlm. 150.

pihak yang korban tidak memperoleh apa-apa dari harta yang diperoleh selama dalam perkawinan jika terjadi perceraian dengan suaminya. Hal ini karena dikalangan umat Islam banyak yang berpendapat bahwa ajaran Islam tidak mengatur masalah harta bersama perkawinan, sehingga jika yang berusaha hanya suami sendiri maka jika terjadi perceraian, sang istri tidak mendapat apa-apa dari harta perkawinan tersebut. Jika seorang istri sama sekali tidak mempunyai aktivitas yang bernilai ekonomis, maka harta dalam keluarga tersebut adalah harta suami, dan tidak ada harta bersama perkawinan. Karena memang tidak ada andil istri dalam harta tersebut. Jika istri memiliki aktivitas yang bernilai ekonomis, seperti dia bekerja sendiri, atau membantu suami dalam pekerjaannya, atau menjadi partner kerja bagi suami, maka dalam keadaan inilah harta bersama itu ada, dan ketika terjadi perceraian, maka istri juga mendapat bagian dari harta tersebut.

Suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa doktrin hukum fiqih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Pada kitab-kitab fiqih disebutkan hanya secara garis besar saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap suatu masalah yang mereka hadapi dalam kenyataannya.

Hal itu para istri khususnya dan umat Muslim pada umumnya harus mengetahui bahwa dalam hukum Islam dikenal istilah syirkah. Syirkah adalah “suatu aqad antara dua pihak atau lebih, yang

bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>17</sup> Berdasarkan konteks pengertian syirkah tersebut, maka ketika suami istri melaksanakan akad nikah, dengan sendirinya mereka telah mengingatkan diri antara satu dengan yang lain dalam suatu perjanjian atau persetujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sakinah yang dihiasi dengan nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut salah satu jalan yang harus dilakukan adalah melalui kegiatan usaha untuk memperoleh nafkah dan harta kekayaan rumah tangga/perkawinan. Hubungan suami istri dalam mewujudkan cita-cita tersebut dilakukan berdasarkan perkongsian usaha/syirkah.

### c. Harta Bersama Berdasar Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam yang keberlakuannya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 merupakan produk hukum terapan Pengadilan Agama yang sering menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa di kalangan muslim Indonesia.

Pada pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta

---

<sup>17</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizman al-Iqtishadi fi al-Islam*, Darul Ummah bairut, 1990, hlm. 146.



bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” Ketentuan pasal ini pada prinsipnya sama dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki pengertian yang lebih detail dan luas. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diberi penafsiran untuk mencari usaha sehingga terwujud harta bersama. Bahwa harta bersama dapat berasal dari hasil usaha suami saja sedangkan istrinya tidak bekerja yang mempunyai nilai ekonomis/menghasilkan uang, atau hasil usaha dari istri sendirian saja tanpa ikut suami, atau keduanya bekerja secara bersama-sama, atau keduanya bekerja dengan profesi yang berbeda dan keduanya memperoleh hasil dari pekerjaannya.<sup>18</sup>

Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa, “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.” Oleh karena itu disamping adanya harta bersama, masing-masing suami istri diperkenankan memiliki harta pribadi berupa harta bawaan. Adapun yang dimaksud dari pasal ini dimungkinkannya adanya asas harta terpisah sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (2) Undang-undang perkawinan.

Apabila terjadi perceraian, pasal 96 dan 97 KHI mengatur sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> M. Anshary. Op.Cit. hlm. 52.

*Pasal 96 ayat (1)*

*“Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal Hukum di atas maka jelas ketika terjadi suatu kematian dan ketika akan dilakukan terlebih dahulu adalah memisahkan harta bersama dalam perkawinan tersebut. Setelah dilakukan pemisahan harta bersama barulah dapat dilakukan pembagian harta warisan peninggalan almarhum.

*Pasal 97*

*“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.*

Artinya pada kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini, ditempuh berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 diatas, yang masing-masing berhak mendapat seperdua harta gono-gini.

#### d. Pembagian Harta Bersama Menurut Adat

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat (adat Jawa) yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan hukum adat setempat. Menurut Van Vollenhoven membagi negara Indonesia atas 19 (Sembilan belas) hukum adat, yang berdasarkan atas perbedaan-perbedaan dalam tata susunan rakyat dengan persekutuan-persekutuan rakyat.<sup>19</sup>

Dari sekian banyak masyarakat adat di Indonesia terdapat tiga macam sistem kekerabatan masyarakat adat, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Sistem kekerabatan Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki atau pihak ayah saja terus-menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ayah (asal). Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti masyarakat Gayo di dataran tinggi Gayo Aceh Tengah, Tapanuli (Batak), Nias, Pulau Buru, Pulau Seram, Lampung, Pepadun, Bali, Lombok.
- b. Sistem kekerabatan Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis

---

<sup>19</sup> H.M Anshary. Op.Cit. hlm. 30.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 31.

keturunan hanya dari pihak ibu saja terus-menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu (asal). Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau, kerinci, Sumendo (Sumatera Selatan), Lampung Paminggir.

- c. Sistem kekerabatan Bilateral/Parental merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui ayah maupun ibu, seperti masyarakat Aceh dan masyarakat Jawa.

Pada umumnya semua masyarakat adat di Indonesia mengenal harta pencaharian bersama dalam perkawinan, disebut juga harta perkawinan. Di Jawa, harta pencarian bersama dalam perkawinan disebut harta gono-gini, pada suku Gayo dikenal dengan istilah reta pohroh, masyarakat Aceh menyebutnya dengan istilah haereuta sihareukat, di Sumatera Barat dikenal dengan istilah harta suarang, pada masyarakat Bali dikenal dengan istilah druwe gabrok, di daerah Sunda diberi nama dengan guna kaya atau tumpang kaya atau raja kaya. Di Jakarta dinamakan harta pencaharian, di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal dengan istilah barang cakara, dan di Madura dikenal dengan nama ghuna-ghana.<sup>21</sup> Hanya saja, istilah gono-gini

---

<sup>21</sup> Ismail Muhammad Syah, **Pencaharian Bersama Suami Isteri**, Penertib Bulan Bintang, Jakarta, 1965, hlm. 18.

lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosakata masyarakat pada umumnya. Walaupun demikian, dalam tulisan ini akan menggunakan istilah baku dalam bahasa Indonesia yaitu harta bersama.

Pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:

- 1) Masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum menikah.
- 2) Dengan ikatan perkawinan, istri maupun suami secara interinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

Suatu perkawinan antara suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara, baik terhadap harta asal maupun harta bersama, hal ini yang menjadikan pembagian harta bersama dalam perkawinan dibagi secara merata antara suami dan istri berupa setengah (1/2) bagian.

Soerjono Soekanto membagi harta benda yang ada dalam perkawinan ke dalam 4 kategori, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Harta kekayaan yang diperoleh dari seorang suami maupun istri yang merupakan suatu warisan ataupun

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 9.

hibah yang diberikan oleh kawan yang dibawa ke dalam perkawinan.

- b. Harta kekayaan diperoleh dari usaha suami dan istri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
- c. Harta kekayaan diperoleh dari hadiah kepada suami dan istri pada waktu perkawinan.
- d. Harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri pada masa perkawinan.

Menurut J.Satrio, "hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan."<sup>23</sup>

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Kedudukan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan digolongkan dalam beberapa macam, yaitu :

- a. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;

---

<sup>23</sup> Muhammad Djumhana. Op.Cit. hlm. 27.

- b. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan disebut harta penghasilan;
- c. Harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan ialah harta pencaharian;
- d. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah disebut sebagai hadiah perkawinan.

Pengaturan hukum atas harta bersama jika terjadi perceraian adalah menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam praktik, penggunaan hukum agama atau hukum adat tergantung pada agama dan suku dari suami istri. Jika suami dan istri yang putus karena perceraian menganut agama Islam, mereka selalu membagi harta benda berdasarkan hukum Islam, namun tidak pula menutup kemungkinan dibagi berdasarkan hukum adatnya. Bagi agama non Islam, pembagian harta benda karena perceraian selalu tunduk pada hukum adat jika mereka satu suku, dan kalau tidak ada kesepakatan diselesaikan menurut hukum adat maka yang berlaku adalah hukum positif.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Rosnidar Sembiring. Op.Cit. hlm. 90.



#### D. Kajian Umum Tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Prinsip Kepastian Hukum adalah penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian formal, yang artinya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran apabila melanggar peraturan tertulis yang ada. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

---

<sup>25</sup> Shidarta. **Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>26</sup>

Empat hal yang berhubungan dengan makna dari kepastian hukum:<sup>27</sup>

“Pertama, bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua bahwa hukum ini didasarkan pada suatu fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang adanya penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik atau kesopanan. Ketiga bahwa fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang cukup jelas sehingga akan menghindari adanya kekeliruan dalam pemaknaan di samping itu juga mudah dijalankan. Keempat hukum positif itu tidak boleh untuk sering diubah-ubah...”

Menurut teori kepastian hukum yang di kemukakan oleh Gustav Redburch hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan yaitu”

a. Kepastian

Hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>27</sup> Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 292-293.

hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.

b. Keadilan

Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsisten bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan se adil-adil nya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.

c. Kemanfaatan

Hukum harus memberikan manfaat bagi semua orang, hukum dibuat agar masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum, sehingga mempermudah hidup masyarakat, bukan justru mempersulit hidup masyarakat.

Penjelasan ketiga asas tersebut penulis gunakan sebagai kerangka teori untuk menilai pengaturan harta bersama yang diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara garis besar menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hal ini menurut penulis telah sesuai menerapkan teori cita hukum tersebut, diatas dengan prioritas yang mengedepankan kepastian hukum,

kemudian keadilan dan kemanfaatan. Adapun maksud dari 3 (tiga) cita tersebut yaitu:

- a. Asas kepastian hukum: telah memenuhi asas kepastian karena dijelaskan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Asas keadilan: telah memenuhi asas keadilan karena dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- c. Asas kemanfaatan: telah memenuhi asas kemanfaatan karena dalam ikatan perkawinan suami dan istri secara intrinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan harta bersama.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 menjadi jelas, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dibawah penguasaan masing-masing yaitu suami dan istri dan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### BAB III

#### METODE PENULISAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berkaitan dan tema penelitian kepastian hukum harta bersama yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis kasus dan peraturan yang berlaku. Adapun penelitian ini normatif karena penulis menganalisis peraturan yang bersumber dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sehingga penyelesaian kasus yang dihasilkan itu harus selaras dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan).

Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.

##### B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan perundang undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah terhadap perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.<sup>1</sup> Yang pada ini isu-isu yang diangkat adalah kepastian hukum pembagian harta bersama

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 93.

menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan setelah terjadi perceraian.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat otoritas berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian.<sup>2</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- 1) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari beberapa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan sekunder juga merupakan data yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap data primer. Bahan hukum yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu

---

<sup>2</sup> **Buku Pedoman Penulisan**, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 25.

hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>3</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedia,<sup>4</sup> seperti kamus Inggris-Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Bahan hukum tersebut diatas yang digunakan oleh penulis diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai bahan kepustakaan yang didapat dari koleksi pribadi milik peneliti, perpustakaan, internet, serta yang diperoleh dari media informasi lainnya.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan yang digunakan dengan melakukan berbagai pendekatan-pendekatan yang disebutkan dalam bagian pendekatan penelitian. Hasil pendekatan penelitian melalui literatur-literatur kemudian distrukturkan secara jelas dan saling berkaitan. Ahmad Rifa'i dalam bukunya membedakan metode interpretasi hukum ini menjadi sebelas jenis

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 14.

<sup>4</sup> Ibid.



antara lain yaitu: Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Historis, Interpretasi Sistematis, Interpretasi Teleologis/Sosiologis, Interpretasi Komparatif, Interpretasi Futuristik/Antisipatif, Interpretasi Restriktif, Interpretasi Ekstensif, Interpretasi Autentik, Interpretasi Interdisipliner, Interpretasi Multidisipliner,

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan **pendekatan interpretasi sistematis**, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang yang berbeda sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.<sup>5</sup>

Hal tersebut mengandung arti bahwa hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan”.<sup>6</sup> Jadi, hal yang paling penting dalam menafsirkan undang-undang adalah bahwa penafsiran tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu Negara.

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1110.

<sup>6</sup> Bambang Sutyoso, **Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)**, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 102.

## F. Definisi Konseptual

Batasan konsep istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya<sup>7</sup> :

a. Kepastian hukum

Adalah hukum harus memiliki kepastian yang mengingat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.

b. Harta Bersama

adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.

c. Perceraian

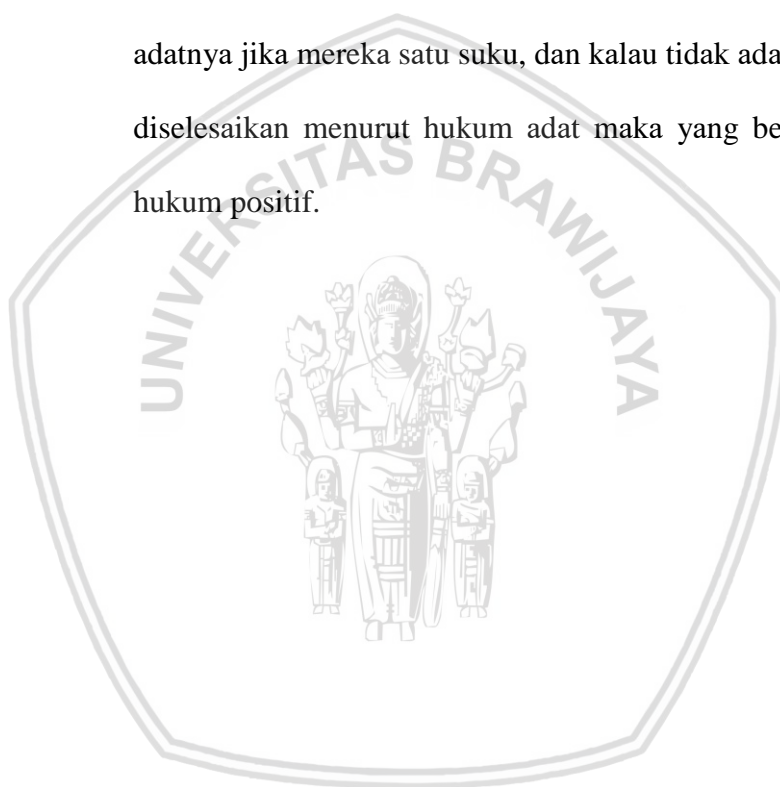
adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Sedangkan, perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

d. Pembagian harta bersama

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 26

Dalam praktik, penggunaan hukum agama atau hukum adat tergantung pada agama dan suku dari suami istri. Jika suami dan istri yang putus karena perceraian menganut hukum Islam, pada umumnya mereka akan membagi harta bersama berdasarkan hukum Islam, namun tidak pula menutup kemungkinan dibagi berdasarkan hukum adatnya. Bagi agama non Islam, pembagian harta benda karena perceraian selalu tunduk pada hukum adatnya jika mereka satu suku, dan kalau tidak ada kesepakatan diselesaikan menurut hukum adat maka yang berlaku adalah hukum positif.



## **BAB IV**

### **Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian**

#### **A. Putusan Hakim Untuk Menentukan Harta Bersama**

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>1</sup> Sah tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan juga dari kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan cara memenuhi semua syarat dan juga rukun hukum dari agamanya dan kepercayaannya tersebut. Menurut R Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Sedangkan, menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.

Sedangkan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>1</sup>Subekti, **Pokok-Pokok dari Hukum Perdata**, Intermedia, Jakarta, 1975, hlm. 20.

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal;
- 2) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;
- 3) Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan;
- 4) Perkawinan berasas monogami terbuka;
- 5) Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan;
- 6) Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun;
- 7) Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan;
- 8) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,”

Menurut sebagian ahli hukum, dengan dicantumkannya kata “diatur menurut hukumnya masing-masing”, menunjukkan bahwa keputusan

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma. Op.Cit. hlm. 6.

mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian akan lebih menemukan rasa keadilan dari pihak yang bersengketa.

Pada pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu”. dikatakan bahwa rukun dan syarat-syarat perkawinan telah ditentukan oleh tiap-tiap ajaran agama dan para pemeluknya diwajibkan untuk mengikuti rukun serta syarat-syarat perkawinan tersebut. Latar belakang sosial pasal 2 UU Perkawinan adalah keragaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dari segi bentuknya, UU Perkawinan merupakan kodifikasi bukan unifikasi. Oleh karena itu, ia memberikan ruang bagi berlakunya hukum perkawinan agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor sosial yang mempengaruhi pasal tersebut bukan faktor agama, melainkan kebijakan politik yang ditetapkan oleh pemerintah ketika itu. Oleh karena itu, pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 ini pada dasarnya diperuntukan bagi warga negara Indonesia untuk menciptakan keluarga yang tentram dan sejahtera.

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi

pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”. berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa:

*Ayat (1) menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.*

*Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.*

Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa,”mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”Ketentuan yang sama diatur pula dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan,” masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.” Pasal ini memunculkan suatu paradigma baru dalam bidang hukum yaitu menyetarakan kedudukan suami istri dalam lalu lintas hukum. Pasal ini menghendaki adanya kesamaan hak bagi suami istri untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang istri dapat saja menjual harta bersama atas persetujuan suaminya, demikian pula sebaliknya.



Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Akan tetapi apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh pasangan suami istri selama perkawinan dapat diatur menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum yang dianutnya. Pembagian Harta Bersama yang diatur menurut hukumnya masing-masing apabila terjadi perceraian, sebagai berikut :


**tabel 1.2**

**Kriteria Hukum Masing-Masing Dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama**

No.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Adat
1	<b>Pasal 37</b> Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing <sup>3</sup>	<b>Pasal 96</b> 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama <sup>4</sup> 2. Pembagian harta bersama bagi seseorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggungkan	Dalam yurisprudensi di Indonesia ada dua putusan mengenai pembagian harta bersama menurut hukum adat, yang menegaskan sebagai berikut: 1. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 februari 1959 (Reg. No 387/K/Sip/1958 menegaskan bahwa menurut hukum adat

<sup>3</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

		<p>sampai adanya kepasian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.<sup>5</sup></p> <p><b>Pasal 97</b> Janda atau duda cerai masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pengadilan Agama.<sup>6</sup></p> 	<p>yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapat separuh harta gono gini<sup>7</sup></p> <p>2. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 (Reg. No. 120 K/Sip/1960) menetapkan bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri.<sup>8</sup></p> <p>Namun di masyarakat bilateral atau parental, ada 3 jenis pembagian harta dalam perkawinan adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harta bawaan suami atau istri kembali kepada yang memiliki ke dalam perkawinan</li> <li>2. Harta penghasilan sendiri suami atau istri kembali yang menghasilkan</li> <li>3. Harta pencaharian di bagi dua bagian antara suami istri menurut keadilan masyarakat setempat.</li> </ol>
--	--	---	---

<sup>5</sup> Pasal 96 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup> Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 februari 1959 (Reg. No 387/K/Sip/1958)

<sup>8</sup> Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 (Reg. No. 120 K/Sip/1960)

<sup>9</sup> Febby Hidayanti, 2017, **Pembagian harta bersama Dalam Hukum Adat** (*online*)

<https://www.notarisdanppat.com/pembagian-harta-bersama-dalam-hukum-adat>.

## **B. Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Berdasar Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengatur, bahwa bila terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>10</sup> Yang di maksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. “Untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dari istilah “hukumnya masing-masing “, haruslah melihat penjelasan pasal tersebut. Dalam penjelasan pasal disebutkan, “yang di maksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.”

Dalam praktik, penggunaan hukum agama atau hukum adat tergantung pada agama dan suku dari suami istri. Jika suami dan istri yang putus karena perceraian menganut agama Islam, pada umumnya mereka akan membagi harta benda berdasarkan hukum Islam, namun tidak pula menutup kemungkinan dibagi berdasarkan hukum adatnya. Bagi agama non Islam, pembagian harta benda karena perceraian selalu tunduk pada hukum adat jika mereka satu suku, dan kalau tidak ada kesepakatan diselesaikan menurut hukum adat maka yang berlaku adalah hukum positif.

Dengan demikian, penyelesaian pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama islam, pembagian harta bersama akan diselesaikan

---

<sup>10</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

berdasarkan hukum islam. Begitu pula bagi masyarakat yang masing berpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

Jika berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan dan penjelasan pasal tersebut, maka terkesan bahwa pembagian harta bersama seolah-olah tidak memiliki acuan bakunya, karena dalam UU Perkawinan tidak mengatur hal tersebut secara detail. Pada UU Perkawinan tidak disebutkan jumlah porsinya bahwa jika terjadi perceraian harta bersama akan dibagi sama rata antara bekas suami dan bekas istri atau dalam jumlah lainnya. Oleh karena itu menurut pendapat beberapa ahli hukum pembagian harta bersama akan dilakukan secara berimbang, yang dimaksud berimbang disini belum tentu sama rata, namun lebih dari sejauh mana masing-masing pihak memasukkan kontribusi jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Sehingga Menurut sebagian ahli hukum, dengan dicantumkannya kata “diatur menurut hukumnya masing-masing”, menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian akan lebih menemukan rasa keadilan dari pihak yang bersengketa.

Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi

konkrit, yang diujikan kepada hati nurani. Dalam rangka meningkatkan peran Hakim sebagai *agent of change* mewujudkan putusan yang benar dan adil maka dituntut bagi seorang Hakim untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dituntut pula bagi seorang Hakim untuk mewujudkan putusan benar dan adil yang sangat didambakan sepenuhnya oleh para pencari keadilan.

Putusan hakim sebagai penemuan hukum dalam artian khusus berarti bahwa Hakim dalam putusannya baik dalam *ratio decidendi*<sup>11</sup> maupun dalam *obiter dicta*-nya<sup>12</sup>, berkewajiban merumuskan pertimbangan-pertimbangan tidak hanya berdasarkan ilmu hukum dan teori hukum lebih-lebih apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang secara mendasar benar-benar menyentuh hati nurani.

Pada dasarnya hakim menerapkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu asas hukum acara ialah hakim dilarang menolak perkara, namun persoalan akan muncul bila suatu perkara hukum tidak memiliki aturan hukum. Di sinilah hakim dituntut untuk mampu menciptakan hukum dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada suatu ketika hakim dibenarkan menyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk suatu putusan yang dirasa adil. Putusan hakim yang menyampingkan peraturan yang ada ini dalam bahasa hukum disebut *Contra Legem*. Penjabaran asas *Contra Legem*<sup>13</sup> merupakan

---

<sup>11</sup> H.M anshary. Op.Cit. hlm. 117

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 117.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 118.

pelaksanaan nilai hukum progresif yang menghendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik aturan hukum.

Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>14</sup> Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah memperhatikan tiga nilai unsur yaitu unsur yuridis (kepastian hukum), unsur sosiologis (kemanfaatan), dan unsur filosofis (keadilan).

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991: 134



Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat. Kerap sekali terjadi terutama perkara-perkara yang mendapat perhatian public dan masyarakat luas.

Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Secara normatif, pengadilan tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, melainkan hakim bekerja “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam putusan suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang



diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya.

Menyangkut harta bersama, adalah harta yang diperoleh sejak kawin sampai batas kawin berakhir yakni perceraian. Terhadap harta itu ada aturan tentang hak suami dan istri serta takaran berapa haknya. Umumnya ketentuan hukum dan yurisprudensi yang diputus oleh Pengadilan adalah dengan rasio 1:1. Tapi bisa pula merujuk pada riwayat terkumpulnya harta, siapa yang dominan, oleh suami atau istri. Secara umum, harta bersama haknya sama, tapi secara fisik bisa salah satu pihak lebih besar dari pada pihak lainnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa menurut hukum yang berlaku, pembagian harta bersama akibat perceraian masing-masing suami istri mendapat bagian yang sama yakni seperdua bagian. Namun demikian dalam kasus-kasus tertentu ketentuan undang-undang tersebut harus dipertimbangkan lain semata-mata untuk mewujudkan putusan yang berkeadilan yang dirasa adil oleh pencari keadilan (*yusticiabelen*).

Oleh karena untuk memahami ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan dan penjelasan pasalnya tidak menjadi pelik apabila kita memperhatikan peraturan lain yang juga mengaturnya. Bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan muslim dan tidak tunduk kepada hukum adat dan sepanjang ketentuan agamanya tidak mengatur lain, pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 28 KUHPerdara, yang berbunyi :

*“setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.”*

Pasal ini secara tegas mengatur soal pembagian harta bersama akibat perceraian, dan dari pasal tersebut dapat ditarik paling tidak 4 (empat) garis hukum, diantaranya :

1. Pembagian harta bersama dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai mati;
2. Besaran perolehan dari harta bersama itu masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian sama;
3. Bagi kasus cerai mati, maka yang memperoleh bagian dari harta bersama itu adalah para ahli warisnya;
4. Untuk menentukan harta bersama tidak memperhitungkan siapa yang lebih dominan dalam berusaha. Artinya, selama harta benda itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka dihitung sebagai harta bersama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.

### **C. Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Berdasar Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI)**

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama sedangkan hal-hal lain-lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembatasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu pasti disebutkan dalam hadis dan al-Hadis ini merupakan sumber hukum Islam juga.

Dalam buku "Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Harta Bersama" disebutkan, sepanjang yang penulis ketahui, tidak di setiap Negara Islam terjadi sengketa pembagian harta bersama antara suami istri. Sengketa harta bersama hanya mungkin terjadi dalam masyarakat di mana di situ terdapat harta bersama. Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas 'urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga.

Sebagaimana bahwa kepemilikan harta suami dan istri dalam masa perkawinan mereka tidak lepas dari 3 (tiga) kategori berikut :<sup>15</sup>

- 1) Harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan istri pada harta itu. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja suami sebelum perkawinan dengan istrinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya yang lazim disebut harta bawaan.
- 2) Harta milik istri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh istri saja tanpa kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja istri sebelum nikah, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk istri, atau harta yang diwariskan kepada istri, dan lain-lain.
- 3) Harta milik bersama suami dan istri. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami istri, atau harta benda yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, dan sebagainya.

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah al-Qur'an

---

<sup>15</sup> Abdul manan, loc.cit hlm. 109.

surat an-Nisa ayat 32, dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.<sup>16</sup>

Setiap barang yang diperoleh selama pekawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut secara yuridis menjadi objek harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapa yang mempunyai kontribusi yang lebih banyak dalam perolehan harta bersama tersebut, siapa yang membeli, terdaftar atas nama siapa, dan harta tersebut di bawah penguasaan siapa. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yang dipertegas oleh Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Terhadap hal ini terdapat putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971, dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Lain halnya jika uang pembeli barang berasal dari harta pribadi suami atau istri, maka barang tersebut tidak menjadi objek harta bersama melainkan menjadi barang milik pribadi. Hal ini dapat dilihat pada kaidah yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 No. 151 K/Sip/1974.

Bagi orang-orang yang beragama Islam dengan sendirinya untuk menyelesaikan pembagian harta bersama pada umumnya akan menggunakan aturan-aturan hukum agamanya yaitu ketentuan Hukum Islam. Di Indonesia, dalam bidang harta bersama, umat Islam Indonesia

---

<sup>16</sup> Abdul Manan, Op.Cit., hlm. 110.

telah berhasil merumuskan hukum-hukum normative yang terdapat dalam al-Quran, al-Hadist, dan doktrin-doktrin Ulama Fikih yang termuat dalam kitab-kitab fikih menjadi hukum nasional dan merupakan hukum materiil bagi badan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya menyelesaikan sengketa harta bersama antara umat Islam. Aturan-aturan dimaksud dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden berupa Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang keberlakuannya melalui inpres nomor 1 tahun 1991 merupakan produk hukum terapan Pengadilan Agama yang sering menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa di kalangan muslim Indonesia.

Pada pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” Ketentuan pasal ini pada prinsipnya sama dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki pengertian yang lebih detail dan luas. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diberi penafsiran untuk mencari usaha sehingga terwujud harta bersama. Bahwa harta bersama dapat berasal dari hasil usaha suami saja sedangkan istrinya tidak berkerja yang mempunyai nilai ekonomis/menghasilkan uang, atau hasil usaha dari istri sendirian saja tanpa ikut suami, atau keduanya bekerja

secara bersama-sama, atau keduanya bekerja dengan profesi yang berbeda dan keduanya memperoleh hasil dari pekerjaannya.<sup>17</sup>

Apabila terjadi perceraian, pasal 96 dan 97 KHI mengatur sebagai berikut :

*Pasal 96 ayat (1)*

*“Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal Hukum di atas maka jelas ketika terjadi suatu kematian dan ketika akan dilakukan terlebih dahulu adalah memisahkan harta bersama dalam perkawinan tersebut. Setelah dilakukan pemisahan harta bersama barulah dapat dilakukan pembagian harta warisan peninggalan pewaris.

Jika terjadi cerai mati dimana suami lebih dahulu meninggal dunia, maka harta perkawinan tersebut terlebih dahulu dibagi dua sama, separuh untuk istri dan separuh lagi untuk bagian alm suaminya, dan bagian suamidari harta bersama itu menjadi budel warisan suami yang wajib dibagi kepada ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pembagiannya, sesuai dengan ketentuan Q. Surat an-Nisa (4) : 12, jika suami meninggal dan mempunyai anak, maka istri mendapat 1/8 bagian dari harta warisan suami, tetapi jika suami tidak mempunyai anak, maka istri mendapat 1/4 bagian dari harta warisan suami

---

<sup>17</sup> M. Anshary. Op.Cit. hlm. 51.



setelah dikeluarkan hutang-hutang, wasiat bila ada, dan biaya penyelenggaraan mayat (takhiz mayat).

Demikian pula halnya jika terjadi cerai mati dimana si istri meninggal lebih dahulu, maka harta bersama dibagi dua sama, seperdua untuk bagian suami dan seperdua sisa untuk bagian istri. Bagian istri dari harta bersama tersebut selanjutnya menjadi budel warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Besar perolehan suami dari harta warisan pewaris (istri) mengacu kepada ketentuan Q.S an-Nisa (4) : 12, bahwa jika istri meninggal tanpa meninggalkan anak, maka suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan istri. Jika istri meninggalkan anak, maka suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan, setelah dikeluarkan hutang-hutang, wasiat jika ada dan biaya pentakhizan mayat.

*Pasal 97*

*“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.*

Artinya pada kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini, ditempuh berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 diatas, yang masing-masing berhak mendapat seperdua harta gono-gini.

Dari kacamata hukum (*secara yuridis*) pembagian sama yakni masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian dari harta bersama, merupakan ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan. Tetapi

secara sosiologis (*social justice*) pembagian harta bersama tidaklah harus dibagi dua sama besar. Misalnya, Apabila yang berusaha mencari nafkah adalah istri, yang sebenarnya hal itu bukan merupakan tugas dan tidak diwajibkan kepadanya, tetapi oleh karena nuraninya terpanggil mencari nafkah untuk keperluan keluarga, sementara suami tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga, maka ketika terjadi perceraian, pantaslah bagi suami tersebut mendapat bagian lebih kecil dari pada bagian istrinya dari harta bersama atau sama sekali tidak mendapat bagian. Disisi lain apabila seorang istri yang tidak memiliki kontribusi dalam mencari nafkah, maka istri tersebut sama sekali tidak berhak memperoleh pembagian harta bersama. Dan apabila masalahnya berakhir dengan perceraian, maka istri hanya berhak mendapatkan mut'ah (pemberian sebagai bentuk penghargaan) sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Baqarah (2): 241 yang artinya."Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang sewajarnya, sabagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang yang takwa." Adapun terhadap kasus perceraian karena kematain suami, maka istri hanya berhak mendapatkan bagian dari warisan suami dan tidak ada bagian dari harta bersama.

Pendapat di atas tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pendapat tersebut lebih kepada pertimbangan kultur masyarakat patrilineal yang cenderung memarginalkan posisi kaum perempuan dalam hukum dan masyarakat. Adapun ketentuan Q.S al-Baqarah (2): 241 tersebut diatas yang dijadikan landasan argumentasi pendapat tersebut, tidak ada korelasinya dengan ketentuan

harta pencarian keluarga/harta bersama. Ayat tersebut membicarakan masalah hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian selain harta bersama, yaitu masalah mut'ah. Oleh sebab itu ayat tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk meniadakan hak seorang istri dari harta perkawinan dengan alasan tidak mempunyai kontribusi dalam pengadaan harta perkawinan. Pasal 34 UU Perkawinan telah mengatur pembagian tugas dalam rumah tangga, dimana tugas suami adalah mencari nafkah dan memenuhi semua keperluan hidup istrinya menurut kemampuannya, sedangkan istri mempunyai tugas mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tugas yang diberikan Undang-Undang kepada seorang istri secara yuridis mempunyai nilai yang sama dengan tugas yang diberikan kepada suami, oleh sebab itu dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan ditegaskan bahwa, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama." Dengan demikian semua perolehan suami selama ikatan perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka berlaku ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan (*juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) dimana suami istri tersebut masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama. Jadi walaupun suami yang bekerja mencari nafkah sementara si istri tinggal dirumah mengatur urusan rumah tangga, maka bila terjadi perceraian, istri berhak memperoleh bagian seperdua dari harta bersama.

Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam pada umumnya akan mencari keadilan terhadap pembagian harta bersama mengacu pada ketentuan pasal 96 dan 97 KHI. Namun pada kasus-kasus tertentu

pembagian harta bersama dapat dibagi berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi dasar pengaturan bagi untuk mengajukan gugatan apabila terjadi persoalan mengenai perceraian dan pembagian harta bersama. Pada dasarnya, Gugatan perceraian yang digabung dengan gugatan pembagian harta bersama adalah hal yang dibenarkan oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bunyinya:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut pasal ini, gugatan harta bersama dapat diajukan bersama-sama secara kumulatif dengan gugatan perceraian. Pasal ini memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang harta bersama pada dua kemungkinan.

Pertama, gugatan tentang harta bersama dapat diajukan bersama-sama gugatan perceraian. Artinya, dua macam gugatan, selanjutnya hakimlah yang mengatur teknis pemeriksaannya di persidangan. Ketentuan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Kedua, dapat diajukan sesudah putusan gugatan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini artinya bahwa gugatan soal harta bersama diajukan tersendiri setelah perceraian terjadi dengan nomor perkara tersendiri yang berbeda dengan nomor perkara perceraian. Opsi kedua ini banyak ditempuh oleh para pencari keadilan (*yusticiabelen*) dengan tujuan agar proses perceraian segera dapat terwujud sehingga status diri para pihak (khususnya Penggugat) mendapat kepastian hukum dengan segera.

Perlu diperhatikan, bahwa terhadap gugatan pembagian harta bersama yang diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian, ataupun gugatan pembagian harta bersama diajukan setelah putusan mengenai perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, hendaknya Penggugat memohonkan kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita marital (*marital beslag*) terhadap objek-objek perkara, hal ini untuk menjaga agar harta kekayaan perkawinan tidak dipindahtangankan oleh lawan dengan cara dijual atau digelapkan, sehingga gugatan tidak hampa (*illusior*).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 227 HIR/261 RBg, Jo Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

#### **D. Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Berdasar Hukum Adat**

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat (adat jawa) yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan hukum adat setempat. Menurut Van Vollenhoven membagi negara Indonesia atas 19 (Sembilan belas) hukum adat, yang berdasarkan atas perbedaan-perbedaan dalam tata susunan rakyat dengan persekutuan-persekutuan rakyat.<sup>19</sup>

Dari sekian banyak masyarakat adat di Indonesia terdapat tiga macam sistem kekerabatan masyarakat adat, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Sistem kekerabatan Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki atau pihak ayah saja terus-menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ayah (asal). Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti masyarakat Gayo di dataran tinggi Gayo Aceh Tengah, Tapanuli (Batak), Nias, Pulau Buru, Pulau Seram, Lampung, Pepadun, Bali, Lombok.
- b. Sistem kekerabatan Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus-menerus ke atas karena ada kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu (asal).

---

<sup>19</sup> H.M Anshary. loc.cit. hlm. 30.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 31.

Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau, kerinci, Sumendo (Sumatera Selatan), Lampung Paminggir.

- c. Sistem kekerabatan Bilateral/Parental merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui ayah maupun ibu, seperti masyarakat Aceh dan masyarakat Jawa.

Pada umumnya semua masyarakat adat di Indonesia mengenal harta pencaharian bersama dalam perkawinan, disebut juga harta perkawinan. Di Jawa, harta pencaharian bersama dalam perkawinan disebut harta gono-gini, pada suku Gayo dikenal dengan istilah reta pohroh, masyarakat Aceh menyebutnya dengan istilah haereuta sihareukat, di Sumatera Barat dikenal dengan istilah harta suarang, pada masyarakat Bali dikenal dengan istilah druwe gabrok, di daerah Sunda diberi nama dengan guna kaya atau tumpang kaya atau raja kaya. Di Jakarta dinamakan harta pencaharian, di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Sulawesi (Bugis dan Makassar) dikenal dengan istilah barang cakara, dan di Madura dikenal dengan nama ghuna-ghana.<sup>21</sup> Hanya saja, istilah gono-gini lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosakata masyarakat pada umumnya. Walaupun demikian, dalam tulisan ini akan menggunakan istilah baku dalam bahasa Indonesia yaitu harta bersama.

---

<sup>21</sup> Ismail Muhammad Syah, **Pencaharian Bersama Suami Isteri**, Penertib Bulan Bintang, Jakarta, 1965, hlm. 18.



Pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum menikah.
- 2) Dengan ikatan perkawinan, istri maupun suami secara interinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

Dalam hukum adat, apabila salah seorang meninggal, lazimnya semua milik bersama itu tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup, seperti halnya semasa perkawinan. Pihak yang masih hidup itu berhak untuk menggunakan barang-barang milik bersama tersebut guna keperluan hidupnya, tetapi apabila untuk keperluan ini ternyata sudah disediakan secara pantas sejumlah harta tertentu yang diambilkan pula dari harta milik bersama itu, maka kelebihanannya dapat dibagi oleh para ahli waris. Kalau ada anak, maka anak itulah yang menerima bagiannya sebagai barang asal. Sedangkan kalau tidak ada anak, maka sesudah meninggalnya suami atau istri yang hidup paling lama, barang-barang tersebut harus dibagi antara kerabat.

---

<sup>22</sup> Happy Susanto, loc,cit, hlm. 10.

Menurut J.Satrio, "hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan."<sup>23</sup>

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Kedudukan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan digolongkan dalam beberapa macam, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
- b. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan disebut harta penghasilan;
- c. Harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan ialah harta pencaharian;
- d. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah disebut sebagai hadiah perkawinan.

Suatu perkawinan antara Suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara, baik terhadap harta asal maupun harta bersama, hal ini yang menjadikan pembagian harta bersama dalam perkawinan dibagi secara merata antara suami dan istri berupa setengah (1/2) bagian.

---

<sup>23</sup> Muhammad Djumhana. Op.Cit. hlm. 27.

<sup>24</sup> Rosnidar Sembiring. Op.Cit. hlm. 90.

Soerjono Soekanto membagi harta benda yang ada dalam perkawinan ke dalam 4 kategori, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Harta kekayaan yang diperoleh dari seorang suami maupun istri yang merupakan suatu warisan ataupun hibah yang diberikan oleh kawan yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta kekayaan diperoleh dari usaha suami dan istri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
- c. Harta kekayaan diperoleh dari hadiah kepada suami dan istri pada waktu perkawinan.
- d. Harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri pada masa perkawinan.

Apabila terjadi putusnya perkawinan akibat perceraian dalam masyarakat hukum adat tertentu, maka di lihat pada suami istri yang bersangkutan, apakah mereka dalam ruang lingkup masyarakat adat yang sama atau berbeda dan bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan.

Barang-barang milik bersama ini dibagi antara kedua belah pihak, suami dan istri. Masing-masing pada umumnya menerima separuh. Tetapi ada beberapa daerah yang mempunyai kebiasaan membagi sedemikian rupa, sehingga suami mendapat dua pertiga dan istri mendapat sepertiga, seperti halnya di beberapa daerah di Jawa Tengah. Asas pembagian dua-pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri di Jawa Tengah disebut asas *segendong sepikul*. Demikian pula halnya dengan masyarakat di daerah Bali, dimana asas suami mendapat dua-pertiga dan istri sepertiga ini rupanya

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 9.

juga berlaku. Bedanya di Bali asas ini disebut *susushun sarembat*. Dimana lambat laun akan lenyap karena tidak sesuai dengan keinsyafan masyarakat Indonesia yang makin lama semakin kuat, bahwa juga dalam hal ini harus ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Keputusan MA, tanggal 25 februari 1959 Reg No. 387 K/Sip./1958 menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, seorang janda mendapat separuh dari harta gono-gini.

Keinsyafan masyarakat Indonesia, bahwa harus ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan ini, pada pertengahan tahun 1960 telah dinyatakan Keputusan Mahkamah Agung, tanggal 9 April 1960 Reg No. 120 K/Sip/1960 yang menetapkan, bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami dan istri.

Pembagian harta bersama juga dapat di bagikan berdasarkan keputusan peradilan adat setempat. Dimana peradilan adat di pimpin oleh hakim adat. Putusan peradilan dalam masyarakat adat atau lebih sering disebut sebagai putusan peradilan adat, pada umumnya konsep peradilan adat bersifat mandiri dan bukanlah sebuah kepercayaan. Hal ini dikarenakan “ putusan hukum adat” memiliki tempat di hukum positif Indonesia seperti yang di jelaskan dalam pasal 18 B Ayat (2), Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Konklusi dasar dari ketentuan tersebut hakikatnya diatur, diakui, dan dihormatinya eksistensi kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk penghormatan

terhadap identitas budaya, hak masyarakat tradisional yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, hingga badan-badan peradilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sehingga putusan dari peradilan adat setempat akan memiliki kekuatan hukum bagi masyarakat adat yang mencari keadilan melalui upaya tersebut. Dengan adanya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang mengakui dan menghormati kedudukan atau eksistensi hukum adat di Indonesia. Sehingga bagi masyarakat adat yang menganut adat lebih menundukkan diri kepada hukum adat setempat dibandingkan dengan hukum lain-lainnya.

Fungsi hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum adat, tidak dibatasi undang-undang, hakim tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian menurut Reglement Indonesia yang baru (RIB) S. 1941 No 44.

Lebih lanjut sebagaimana juga dikemukakan Ter Haar bahwa peradilan menurut hukum adat itu mengandung arti bahwa Hakim itu seterusnya bertanggung jawab membina hukum adat dalam masyarakat dan apabila tidak ada yurisprudensi atau ketetapan yang sudah ada itu sudah tidak sesuai lagi, maka hakim harus memutuskan yang menurut keyakinannya bahwa hal itu berlaku menurut keadaan dan perkembangan masyarakat. Maka kewajiban Hakim dalam mengadili menurut hukum adat berarti memberikan bentuk terhadap sesuatu yang dibutuhkan sebagai keputusan hukum, berdasar sistem hukum, kenyataan sosial dan asas-asas kemanusiaan (perhatikan ter Haar, 1960:236).

Jadi setelah perkara diperiksa di Pengadilan Negara dengan menggunakan hukum adat, maka hakim dapat mengambil keputusan sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Putusan menyamakan

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang sama dengan putusan Hakim terdahulu

b. Putusan menyesuaikan

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang tradisional

c. Putusan menyimpang

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku

d. Putusan menyampingkan

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi yang menyingkirkan atau menyisihkan kaidah hukum adat yang berlaku

e. Putusan jalan tengah

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi jalan tengah di antara keterangan para pihak yang tidak jelas

f. Putusan mengubah

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi mengubah kaidah hukum adat yang lama dengan kaidah hukum adat yang baru

---

<sup>26</sup> R. Soeroso, **Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 Tentang Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15.

g. Putusan baru

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung kaidah hukum yang baru menggantikan kaidah hukum yang lama yang tidak sesuai lagi

h. Putusan menolak

Dalam hal ini putusan Hakim mengandung isi menolak tuntutan atau gugatan para pihak berperkara karena tidak pada tempatnya.

Demikian bermacam-macam jenis putusan yang dapat ditetapkan hakim dalam menyelesaikan perkara adat di pengadilan dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar pertimbangan hakim menentukan hukum yang berlaku dengan menggunakan yurisprudensi.<sup>27</sup> Istilah yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechtsgeleerdheid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata “*yurisprudentie*” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan-tetap atau hukum-peradilan. Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum (*algemeene rechtsleer: General theory of law*), sedangkan untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah Case Law atau Judge Law. Dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah putusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim yang lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama.

---

<sup>27</sup> Purnadi Purbacaraka, **Perundang-undangan dan yurisprudensi**, Citra Aditya, Jakarta, 1993 hlm. 55.



Di dalam praktik terdapat hukum yurisprudensi (*yurisprudentie recht*) yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negara tertinggi (MA). Di sini putusan pengadilan tidak langsung menimbulkan hukum, melainkan merupakan faktor saja dalam pembentukan hukum, karena biasanya putusan-putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Jadi yang dianut oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah itu kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau hukum yurisprudensi. Antara putusan-putusan dari pengadilan tertinggi itu didapat putusan-putusan yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai perkara hukum yang dinamakan *standaardarresten*.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Shidarta. **Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

Menurut teori kepastian hukum yang di kemukakan oleh Gustav Redburch hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan yaitu”

a. Kepastian

Hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.

b. Keadilan inti keadilan apa, masukin pasal sudah menjelaskan keadilan belum,

Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsisten bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan se adil-adil nya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.

c. Kemanfaatan

Hukum harus memberikan manfaat bagi semua orang, hukum dibuat agar masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum, sehingga mempermudah hidup masyarakat, bukan justru mempersulit hidup masyarakat.

Pembagian harta bersama antara suami istri setelah terjadi perceraian membebaskan para pihak untuk menggunakan hukum mana yang mereka pergunakan dalam pembagian harta bersama tersebut. Mengingat pada kasus Salmiati mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi

perceraian di desa Selodang, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di desa ini, apabila ada terjadi kasus cerai perkawinan yang dilakukan oleh seorang istri (gugatan cerai), maka wanita tersebut tidak menerima harta bersama dari pihak suaminya, akibat gugatan cerai yang dilakukannya. Namun, apabila cerai itu dilakukan oleh pihak suami (thalaq), suami tersebut akan mendapat pembagian harta bersama dari perkawinan yang telah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Rusnah yang menggugat cerai terhadap suaminya Basri, dimana hakim Pengadilan Agama Kabupaten Siak mengabulkan gugatan cerai Rusnah tersebut.<sup>29</sup> Akibatnya, berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, Rusnah harus keluar dari rumah suaminya dengan tanpa membawa apa-apa dari harta yang telah diperolehnya selama perkawinan yang telah dilaluinya. Kasus serupa juga dialami juga oleh Salmiati, yang menggugat cerai terhadap suaminya Muhammad Jais, dan gugatan cerai tersebut dikabulkan juga oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Siak.<sup>30</sup> Sehingga Rusnah dan Salmiati tidak mendapat bagian dari harta bersama yang diperoleh bersama dengan mantan suaminya selama perkawinan. Menurut tokoh adat di desa tersebut, diantara alasannya adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Bahwa ketentuan seperti sudah lama menjadi warisan dari pendahulu mereka serta menjadi rujukan bagi pelaku adat,
2. Ditetapkan seperti ini tentunya membuat jera sekaligus peringatan bagi istri-istri yang lain bahwa menggugat cerai oleh

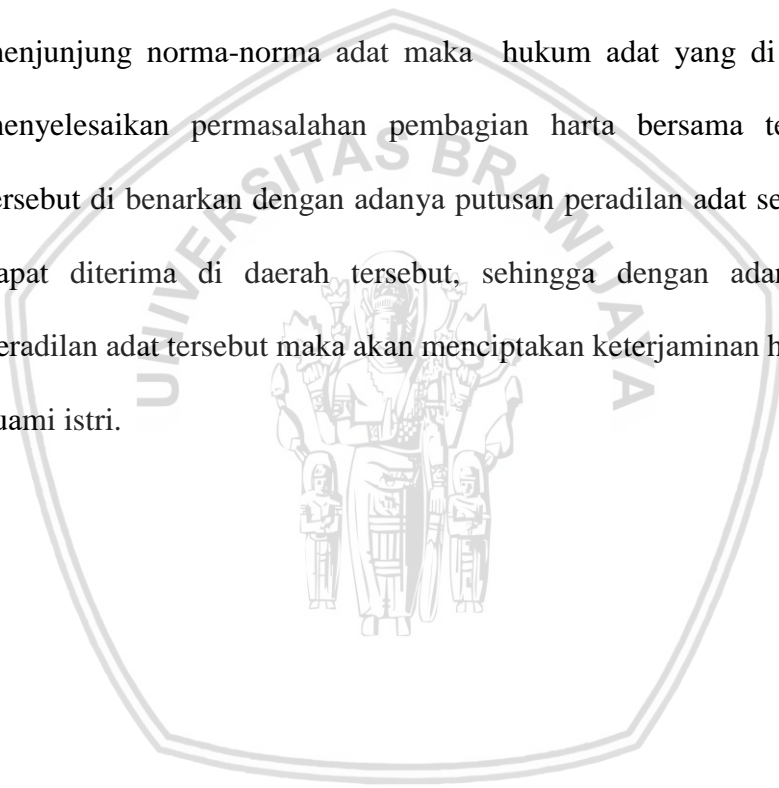
<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkalis, No : 05/Ptd.G/PA.BKS, tanggal 15 Januari 2004

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkalis, No : 126/Ptd.G/PA.BKS, tanggal 17 September 2009

<sup>31</sup> Azzumar. Op.Cit. hlm. 5

seorang istri adalah perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum adat.

Berdasarkan contoh kasus diatas, bahwa Rusnah dan Salmiati telah melakukan perceraian secara Hukum Islam dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat, namun menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama tidak menggunakan Hukum Islam melainkan menggunakan hukum adat setempat karena penduduk desa ini sangat menjunjung norma-norma adat maka hukum adat yang di pilih dalam menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama tersebut. Hal tersebut di benarkan dengan adanya putusan peradilan adat setempat yang dapat diterima di daerah tersebut, sehingga dengan adanya putusan peradilan adat tersebut maka akan menciptakan keterjaminan hukum antara suami istri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Penyelesaian pembagian harta bersama menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum karena di Indonesia ada hukum islam, hukum adat dan hukum nasional. Untuk cita-cita ingin berkepastian hokum dalam hal ini belum bisa karena warga negara Indonesia (WNI) masih pluralisme (beranekaragam) masih menganut agama, adat, dan hukum nasional dan sebenarnya ini bisa, ini adil karena menurut agamanya mereka masing-masing ini adil, apakah pasti ya pasti karena dikembalikan ke agamanya. Kepastian hukum dalam hal ini tidak sepenuhnya terpenuhi tetapi menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adil karena di kembalikan kepada masing-masing agamanya. Pada saat dikembalikan kepada masing-masing agamanya itu dinamakan dengan kepastian hukum, jadi tidak pastinya hanya ditatarkan nomenklatur pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tapi sebenarnya bermakna adil, ketika kepastian dan keadilan di sandingkan mana yang dipilih, yang dipilih pasti keadilan dari pada kepastian kemudian kemanfaatan. Bagi orang yang beragama islam, pembagian harta Bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat, sepanjang beragama islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan

berdasarkan hukum islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka. Mengingat bahwa jika perkawinan secara islam maka perceraian dilakukan secara islam juga, namun pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan hukum lainnya. Para pihak yang bercerai (mantan suami-istri) dengan sukarela menundukan dirinya dan meyakini memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta Bersama bagi setiap orang berbeda-beda, tergantung hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

## **B. SARAN**

Terhadap penelitian ini, penulis memiliki saran ataupun masukan kepada:

- a) Kepada hakim, bagi hakim dalam memutus suatu perkara-perkara yang bersinggungan dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharapkan agar diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku.
- b) Kepada masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang pembagian harta bersama menurut hukum positif di Indonesia, khususnya pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad, **Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*legisprudence*)**, Jakarta, Kencana Indonesia, 2010.
- Azzumar, **Pembagian Harta Bersama Akibat Cerai Gugat dalam Hukum Adat Menurut Perspektif Hukum Islam**, Pekanbaru, Grafika, 2011.
- Anshary, H.M, **Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2016
- Djumhana, Muhammad, **Hukum Ekonomi Sosial Indonesia**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Hadikusuma, Hilman, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama**, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Manan, Abdul, **Anekan Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mahmud, Peter, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Rasjidi, H.M, **Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Alumni Bandung, Mandar Maju, 2011.
- R. Soeroso, **Yurisprudensi Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Subekti, **Pokok-Pokok dari Hukum Perdata**, Jakarta, Intermasa, 1975.
- \_\_\_\_\_, **Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan**, Jakarta, Intermasa, 1975.
- Shidarta, **Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum**, Bandung, Genta Publishing, 2013.
- Sutiyoso, Bambang, 2015, **Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)**, Yogyakarta, UII Press, 2015.
- Sonny Dewi Judiasih, **Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)**, Bandung, PT Refika Aditama, 2015.
- Syahrani, H, Riduan, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni Bandung, Mandar Maju, 2010.



Satrio, J, **Hukum Harta Perkawinan**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Sembiring, Rosnidar, **Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Raja Grefindo, 2016.

Syahrani, Riduan, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Bandung, Citra Aditya, Purbacaraka, Purnadi, **Perundang-undangan dan Yurisprudensi**, Jakarta, Citra Aditya, 1993.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Taqiyuddin **An-Nabhani, An-Nizman al-Iqtishadi fi al-Islam**, Darul Ummah bairut, 1990.

Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, **Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia**, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 1;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## **PENETAPAN**

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis, No: 05/Pdt.G/PA.BKS, tanggal 15 Januari 2004.

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis, No: 126/Pdt.G/PA.BKS, tanggal 17 September 2009.

**INTERNET**

Hidayanti febby, **Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum adat**  
<https://www.notarisdanppat.com/pembagian-harta-bersama-dalam-hukum-adat>, 2017

